



## Pengaruh Upah Minimum, Nilai Tukar Petani, dan Inflasi Sektoral terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa

Irma Ismawati<sup>1\*</sup>, Syarwani Canon<sup>2</sup>, Fitri Hadi Yulia Akib<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Jl. Jend. Sudirman No.6 Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo *Korespondensi penulis: [irmaismawati226@gmail.com](mailto:irmaismawati226@gmail.com)*

**Abstract.** *The phenomenon of poverty often occurs in every country, especially in developing countries. The level of poverty in a country depends on two main factors, namely the average level of national income and the width of the income distribution gap. Poverty cannot only be measured through income national per capita because per capita income calculates the average income of people in a country. The high level of per capita national income in a country, if the distribution of income is unequal then the level of poverty in that country cannot be avoided, and vice versa, no matter how equal the distribution of income in a country is, if the average level of national income is low, then poverty will also become more widespread. This research aims to determine the effect of minimum wages, farmer exchange rates, and inflation in the primary sector, secondary sector and tertiary sector on poverty on the island of Java. This research uses quantitative research methods using secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), using panel data analysis techniques. In this research, it was found that economic factors such as the Provincial Minimum Wage (UMP), Farmer Exchange Rate (NTP), and the inflation rate had a significant influence on the poverty level on the island of Java in the 2017-2022 period.*

**Keywords:** *Minimum Wage, Farmer Exchange Rate, and Sectoral Inflation*

**Abstrak.** Fenomena kemiskinan sering terjadi di setiap negara, terutama di negara-negara berkembang. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Kemiskinan tidak hanya bisa diukur melalui pendapatan nasional perkapita dikarenakan pendapatan perkapita menghitung rata-rata pendapatan masyarakat di suatu negara. Tingginya tingkat pendapatan nasional perkapita suatu negara, jika distribusi pendapatannya tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut tidak dapat dihindarkan, demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh Upah Minimum, Nilai Tukar Petani, dan Inflasi Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier terhadap kemiskinan di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan menggunakan teknik analisis data panel. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa faktor-faktor ekonomi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Nilai Tukar Petani (NTP), dan tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2017-2022.

**Kata kunci:** Upah Minimum, Nilai Tukar Petani, dan Inflasi Sektoral

### 1. LATAR BELAKANG

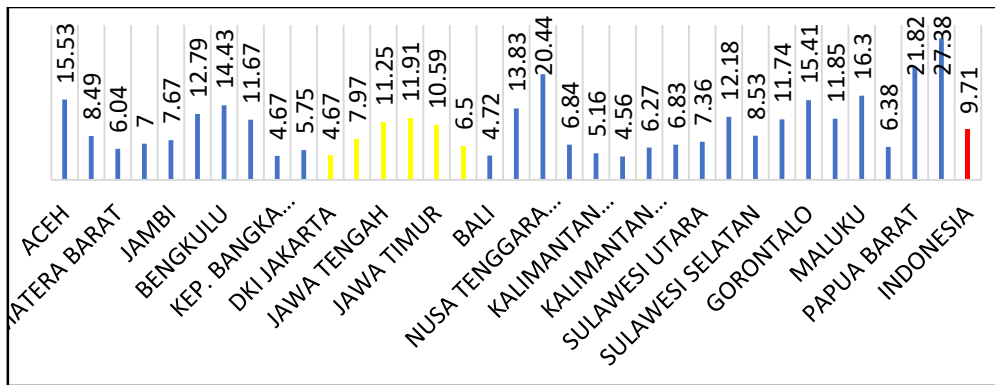
Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara terutama di negara berkembang. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi bersama. Setiap negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya. Berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut salah diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi haruslah merata agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Fenomena kemiskinan sering terjadi di setiap negara, terutama dinegara - negara berkembang, karena ketidakmampuan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan. Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara holistik M. Natsir dalam (Pratiwi, 2021).

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Kemiskinan tidak hanya bisa diukur melalui pendapatan nasional perkapita dikarenakan pendapatan perkapita menghitung rata-rata pendapatan masyarakat disuatu negara. Tingginya tingkat pendapatan nasional perkapita suatu negara, jika distribusi pendapatannya tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut tidak dapat dihindarkan, demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas Smith, dalam (Pratiwi, 2021).

Pulau Jawa adalah daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, menampung lebih dari separuh populasi negara (56 persen). Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga tingkat kemiskinan di wilayah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi keseluruhan Indonesia. Pulau Jawa juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia; contohnya, Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional.

PDRB pulau jawa juga merupakan yang paling tinggi dari semua total pulau yang ada di indonesia. Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) DKI Jakarta menjadi salah satu contoh provinsi yang ada di pulau jawa yang memiliki PDRB tertinggi yaitu mencapai 16,64 persen, serta provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 14,26 dan 12,65 persen. Maka pulau jawa bisa di katakan sudah cukup maju. Namun, hal ini belum mampu mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap wilayah karena meskipun PDRB pulau jawa paling tinggi kemiskinan di pulau jawa pun masih bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya.



**Gambar 1.** Tingkat Penduduk Miskin Indonesia  
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Pada gambar 1. diatas, tingkat penduduk miskin di pulau jawa jika dibandingkan dengan pulau kalimantan masih ada beberapa provinsi yang ada di pulau jawa yang tingkat penduduk miskinnya lebih tinggi di bandingkan pulau kalimantan. Salah satunya adalah Yogyakarta, jika dilihat berdasarkan gambar diatas tingkat kemiskinan di provinsi yogyakarta persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi yang ada di pulau kalimantan yaitu 11,91%. Sementara tingkat kemiskinan yang ada di pulau kalimantan provinsi yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah Kalimantan Barat yaitu 6.84%. Artinya kemiskinan di pulau jawa itu masi bisa dikatakan meningkat.

Sebagai pulau yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kemiskinan di pulau ini memiliki potensi yang lebih signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional. Pulau jawa memerlukan strategi yang tepat dalam menentukan kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya manusianya agar membawa kemajuan di daerah sehingga mendorong melemahnya angka kemiskinan yang rentan dipengaruhi oleh variabel makro seperti upah minimum, nilai tukar petani dan inflasi. Inflasi di Pulau Jawa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kesempatan kerja, hal ini karena inflasi terjadi pada sisi penawaran. Inflasi sisi penawaran merupakan kenaikan inflasi akibat kenaikan biaya input (cost-push inflasi). Selain kenaikan biaya, inflasi sisi penawaran juga dapat disebabkan oleh kebijakan penetapan harga pemerintah (penetapan harga eksekutif) dan guncangan pasokan. Faktor penting penyebab inflasi di Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah kebijakan yang diambil oleh lembaga selain Bank Indonesia, misalnya kebijakan penghapusan subsidi pemerintah atau kebijakan kenaikan pajak yang menyebabkan kenaikan harga barang tersebut (managed price).

Inflasi juga dapat disebabkan oleh gangguan pada sisi penawaran (supply shock), misalnya jika terjadi musim kemarau yang menyebabkan gagal panen, bencana alam, dan gangguan distribusi sehingga mempersulit distribusi. Gangguan ini akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan sehingga menyebabkan peningkatan tingkat harga barang

tersebut secara umum dan pada akhirnya meningkatkan tingkat inflasi Suseno dalam (Febriana, Irma; Kencono, 2019).

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indeks yang mewakili kesejahteraan petani yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP adalah nilai tukar (terms of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani, dinyatakan dalam persentase. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung pada perubahan harga barang yang dijual petani dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sebagai pulau dengan penduduk tertinggi serta merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun kemiskinan di beberapa provinsi di pulau jawa melebihi rata-rata nasional. Meskipun variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti tingkat penerimaan UMP yang tiap tahunnya cukup mengalami peningkatan. Namun variabel lain seperti Nilai Tukar Petani dan Inflasi justru mengalami fluktuasi. Maka hal ini yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Upah Minimum Nilai Tukar Petani Dan Inflasi Sektoral Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum, nilai tukar petani, inflasi sektor primer, inflasi sektor sekunder, dan inflasi sektor tersier terhadap kemiskinan di pulau jawa, adapun penelitian sebelumnya (Pratiwi, 2021) menemukan bahwa Nilai tukar petani dan indeks upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di pulau jawa, penelitian lainnya juga menyatakan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau jawa, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan. Kebaruan pada penelitian ini terletak pada variabel dan data dalam penelitian ini

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah diterapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi,kebebasan,hak mendapatkan sesuatu , menikmati hidup dan lain-lain.

Menurut Kotze dalam (Yulianto Kadji, 2004), masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui melalui kesempatan yang ada.

Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal

### **Inflasi**

Inflasi merupakan tren kenaikan harga barang dan jasa pada tahun yang sering terjadi secara terus menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang dan jasa dalam negeri akan meningkat. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan nilai uang menurun. Oleh karena itu, inflasi juga dapat dipahami sebagai penurunan nilai uang dibandingkan nilai barang dan jasa pada umumnya (BPS, 2018).

Inflasi sendiri dibedakan menjadi empat jenis, yaitu inflasi sedang Inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga tetap kurang dari 10% pertahun Inflasi moderat, dimana kenaikan harga tetap antara 10% dan 30% pertahun Inflasi tinggi, inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga tetap antara 30% sampai 100% pertahun dan hiper inflasi atau inflasi yang tidak terkendali, inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga melebihi 100% pertahun Muhaimin dalam (Aditya Iswanto, 2018). Ada dua kemungkinan penyebab inflasi:

1. Demand Full Inflation, yang disebabkan oleh kenaikan harga terjadi karena peningkatan permintaan barang namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan atau peningkatan jumlah penawaran barang tersebut Sukirno dalam (Aditya Iswanto, 2018). Menurut hukum permintaan, jika permintaan suatu barang tertentu tinggi sedangkan penawaran barang tersebut tidak berubah atau jika tidak ada kenaikan maka harga barang tersebut akan meningkat.
2. Cost-push Inflation, faktor ini terjadi karena biaya produksi suatu barang tertentu meningkat akibat kenaikan harga biaya input, sehingga perusahaan yang ingin mempertahankan keuntungan harus menaikkan harga. Hal ini meningkatkan terjadinya inflasi suatu barang yang disebabkan oleh kenaikan harga terjadi karena peningkatan permintaan barang namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan atau peningkatan jumlah penawaran barang tersebut.

## **Teori Upah**

Upah dan pengangguran mempunyai keterkaitan yang cukup erat, dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah pengangguran. Upah adalah pembayaran atas pelayanan fisik dan mental kepada pekerja. Upah adalah sejumlah uang yang diterima pekerja dari kontraktor sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi Yogatama dalam (Pratiwi, 2021).

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu:

1. pemberian imbalan atau nilai pekerjaan
2. penyediaan intensif
3. jaminan kebutuhan buruh

Upah mempunyai pengaruh yang besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja. Perubahan upah akan mempengaruhi skala penawaran tenaga kerja. Menurut hukum penawaran dan permintaan, upah yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja. Jika upah relatif rendah, jumlah pekerja yang dipekerjakan akan sedikit.

Teori upah alam, dari david ricardo teori yang menerangkan:

1. upah menurut kodrat adalah upah yang cukup pemeliharaan hidup pekerja dengan kelurganya.
2. di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah disekitar upah menurut kodrat. Undang –undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan Mankiw dalam (Pratiwi, 2021).

### **(NTP) Nilai Tukar Petani**

NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh petani ( $I_t$ ) dan indeks harga yang dibayar oleh petani ( $I_b$ ). Indeks harga yang diterima oleh petani ( $I_t$ ) dan indeks yang dibayar oleh petani ( $I_b$ ) dihitung dengan menggunakan formula Modified Laapeyres Index.

BPS menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indeks yang mewakili kesejahteraan petani yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Secara teori, NTP merupakan ukuran kesejahteraan petani, khususnya yang melihat pendapatan dan pengeluaran petani. Jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran maka kesejahteraan petani akan meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi NTP maka semakin tinggi

keuntungan yang diterima petani atau semakin baik keadaan pendapatannya Hendayana dalam (Pratiwi, 2021).

Nilai Tukar Petani (NTP) seringkali dikaitkan dengan kondisi perekonomian Petani. Indeks ini bahkan menjadi salah satu indikator yang paling digemari oleh berbagai pihak untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah nilai tukar (terms of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani, dinyatakan dalam persentase. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung pada perubahan harga barang yang dijual petani ( $I_t$ ) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani ( $I_b$ ).

### **Ukuran NTP (Nilai Tukar Petani)**

NTP berguna untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan untuk produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP tersebut menunjukkan daya saing produk pertanian sebesar dibandingkan produk lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya spesialisasi produk dan peningkatan mutu produk pertanian.

NTP merupakan indikator tidak langsung kesejahteraan petani, dan merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar petani.

Arti angkatan NTP:

1.  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus, Harga produk naik dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih dari pengeluarannya.
2.  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3.  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan alasan peneliti hanya mengambil sampel data menggunakan data panel. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data, bersifat kuantitatif /statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif

$$POV = \alpha + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 NTP_{it} + \beta_3 ISP_{it} + \beta_4 ISS_{it} + \beta_5 IST_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- POV = Kemiskinan
- UMP = Upah Minimum Provinsi
- NTP = Nilai Tukar Petani
- ISP = Inflasi Sektor Primer
- ISS = Inflasi Sektor Sekunder
- IST = Inflasi Sektor Tersier
- I = Wilayah ( Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur Dan Banten
- T = Tahun (2017 Sampai 2022)
- $\beta_0$  = Konstanta Regresi
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi
- E = Standar Error

Tahapan dalam Analisis data panel dapat melalui pemilihan model dengan melakukan pengujian model berupa Uji Chow dan Uji Hausman. Kemudian Model yang di uji terdiri dari Common Eceft Model, Fixed Effect Model dan Random Effect model. Berikut tahapan dari analisis data panel.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan gambaran objektif tentang temuan riset peneliti, berupa inovasi penelitian, penafsiran, interpretasi data, korelasi yang diperoleh, dan generalisasi hasil. Jika terdapat hipotesis, maka bagian ini menjelaskan proses dan hasil pengujian hipotesis. Hasil penelitian harus disajikan dengan jelas dan teratur sehingga benar-benar dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu peneliti menyusun sistematika pengujian berikut ini.

##### Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik dari kumpulan data tanpa melakukan kesimpulan umum, sebagaimana diungkapkan oleh Ghozali (2016). Berikut besaran deskriptif dari variabel yang digunakan pada penelitian ini

**Tabel 1. Besaran Deskriptif Variabel**

	KEMISKINAN	UMP	NTP	IP	IS	IT
Mean	8.755556	2141503.	101.6239	2.752222	0.269722	<b>0.581667</b>
Median	9.540000	1810351.	100.9100	3.505000	2.370000	<b>2.855000</b>
Maximum	13.02000	4573845.	110.6700	20.56000	6.360000	<b>13.12000</b>
Minimum	3.470000	1163059.	93.37000	-71.19000	-76.88000	<b>-77.18000</b>
Std. Dev.	3.153207	928389.9	3.450272	14.12669	13.30599	<b>13.61737</b>
Observations	36	36	36	36	36	<b>36</b>

Sumber: E-views, diolah (2024)



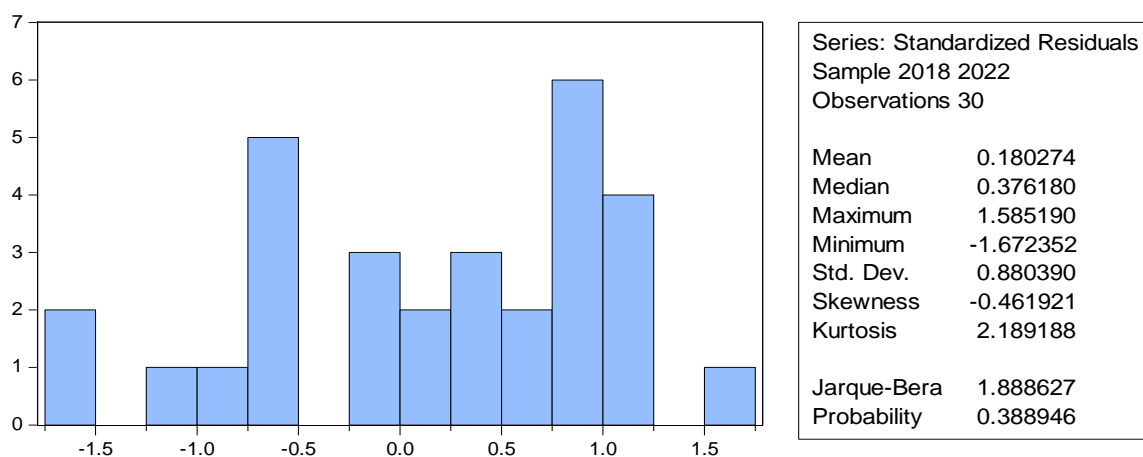
Berdasarkan tabel 1. analisis statistik deskriptif, Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan variasi yang signifikan, dengan rata-rata sebesar 2141503 dan median 1810351, menciptakan perbedaan yang cukup besar antara nilai-nilai individu. Hal ini menandakan adanya perbedaan upah yang signifikan di antara provinsi-provinsi. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menggambarkan variasi yang signifikan, dengan rata-rata sebesar 101.6239 dan median 100.9100.

Inflasi Sektor Primer (IP) menunjukkan sedikit variasi dengan rata-rata 2.752222, sementara Inflasi Sektor Sekunder (IS) dan Inflasi Sektor Tersier (IT) menunjukkan variasi yang lebih tinggi dengan rata-rata masing-masing sebesar 0.269722 dan 0.581667. Nilai-nilai maksimum dan minimum pada semua variabel menyoroti adanya ketidaksetaraan yang ada dalam distribusi data, dan standar deviasi yang tinggi menandakan variasi yang signifikan dalam pengukuran tersebut.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memenuhi syarat BLUE dan data tidak bersifat bias.

#### 1. Uji Normalitas



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas Residual

Sumber: E-Views, (Diolah), 2024

Hasil uji normalitas residual di atas menunjukkan nilai jarque-bera sebesar 1.888627 dengan p-value sebesar 0.388946 dimana  $> 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima atau yang berarti data pada penelitian ini berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Beberapa hubungan linier (Pendeteksian Multikolinearitas) dapat dimanifestasikan secara statistik (VIF) maupun matematis (Matriks). Dan dalam pengujian ini menggunakan salah satunya saja yakni dalam matematis (matriks). multikolinearitas dengan metode pair wise

correlation, nilai koefisien korelasi  $< 0,90$ . Jika dibawah dari  $0,90$  maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas:

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

	UMP	NTP	IP	IS	IT
UMP	1.000000	-0.331617	-0.103371	-0.102461	0.266186
NTP	-0.331617	1.000000	0.426458	0.256509	0.105291
IP	-0.103371	0.426458	1.000000	0.200256	0.067902
IS	-0.102461	0.256509	0.200256	1.000000	0.052765
IT	0.266186	0.105291	0.067902	0.052765	1.000000

Sumber: E-Views, (Diolah), 2024

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas baik itu positif maupun negatif. Sehingga disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji Gletsjer digunakan dalam tahapan pengujian ini, dimana hanya membandingkan nilai dari estimasi absolute residual (RESABS) dengan Variabel bebas. Jika nilai prob nya  $< 0,05$  maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Berikut hasil uji heterokedastisitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.205607	1.967966	0.104477	0.9175
UMP	-2.568496	7.217684	-0.355862	0.7244
NTP	0.002325	0.018743	0.124029	0.9021
PRIMER	0.002014	0.010693	0.188308	0.8519
SEKUNDER	-0.039500	0.023767	-1.661992	0.1069
TERSIER	0.042700	0.021895	1.950229	0.0605

Sumber: E-Views, (Diolah), 2024

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh nilai probabilitas variabel bebas lebih besar dari taraf signifikan  $0,05$ . Sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Pemilihan Model

Sebelum melakukan penentuan model regresi data panel maka perlu dilakukan uji untuk menentukan model regresi data panel. Penentuan model penelitian ini dilakukan dengan mengestimasi setiap model yang akan digunakan dalam melakukan analisis penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang relevan, dalam pemilihan model terdiri dari dua yakni Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM. Uji Chow diperuntukan mengambil keputusan dari kedua model yang dapat dipilih yakni CEM dan FEM dengan melihat nilai dari  $\rho$ -cross section F. Sedangkan Uji Hausman diperuntukan untuk mengambil keputusan dari kedua model yang dapat dipilih antara FEM dan REM dengan melihat nilai  $\rho$ -cross section random. Uji LM

diperuntukan untuk mengambil keputusan dari kedua model yang dapat dipilih REM dan CEM dengan melihat nilai Both Breusch-Pagan. Berikut hasil pengujian Chow:

**Tabel 4. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	58.328444	(5,25)	0.0000
Cross-section Chi-square	91.400280	5	0.0000

Sumber: E-Views (Diolah), 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui bahwa nilai prob. pada uji chow adalah 0.0000. Nilai ini jika dibandingkan dengan taraf signifikansi  $< 0,05$ . Sehingga, keputusan yang diambil yaitu model Fixed Effect (FEM). Namun, masih perlu untuk diuji Hausman. Berikut hasil pengujian Hausman:

**Tabel 5. Hasil Uji Hausmen**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	291.642222	5	0.0000

Sumber: E-Views (Diolah), 2024

Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui bahwa nilai prob. pada uji Hasuman adalah 0.0000. Nilai ini jika dibandingkan dengan taraf signifikansi  $< 0,05$ . Sehingga, keputusan yang diambil yaitu model Fixed Effect (FEM). Oleh karena itu, tidak perlu dilanjutkan pengujian Langrange Multplier Test. Maka keputusannya yaitu, model Fixed Effect yang digunakan pada penelitian ini.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi yang telah diestimasi dan dilakukan pemilihan model data panel, maka hasil analisis regresi data panel Fixed Effect Model (FEM). Berikut hasil dari estimasi menggunakan Fixed Effect Model yang tersaji dalam tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.33707	2.991649	7.466474	0.0000
UMP	-0.092451	0.023949	-3.860288	0.0007***
NTP	-2.263381	2.753494	-8.220032	0.0000***
I_PRIMER	-0.009468	0.002640	-3.586528	0.0015***
I_SEKUNDER	0.212533	0.027362	7.767571	0.0000***
I_TERSIER	-0.208281	0.023833	-8.739209	0.0000***
R-squared	0.899985			
Adjusted R-squared	0.879149			
F-statistic	43.19283			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keterangan: (\*\*\*) signifikan di 1%, (\*\*) signifikan di 5% dan \*) Signifikan 10%, (NS) Tidak Signifikan

Sumber: E-Views (Diolah), 2024

Model inferensi diatas dapat di intrepretasikan dalam kalimat sebagai berikut:

Kemiskinan tanpa dipengaruhi oleh variabel independen apapun dalam model penelitian ini bernilai 22.33707 persen. Upah Minum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan UMP sebesar 1 rupiah akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.092451persen. Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan NTP sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan -2.263381persen.

Inflasi Sektor Primer (Primer) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan sektor primer sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.009468persen. Inflasi Sektor Sekunder (Sekunder) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan sektor sekunder sebesar 1 persen maka akan meningkatkan kemiskinan 0.212533persen. Inflasi Sektor Tersier (Tersier) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya setiap peningkatan sektor tersier sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.208281persen.

### **Pengujian Hipotesis Statistik**

Pengujian Hipotesis dapat menggunakan teknik statistik agar dapat menyajikan hasil pengujian dengan cara signifikan secara statistik. Akan tetapi yang terkait dengan pengujian hipotesis statistik adalah koefisien determinasi klasifikasi R, Uji Signifikansi Statistik F, dan Uji Parsial (t-statistik).

#### **1. Kefesien Determinasi**

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan besaran presentase perubahan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.Nilai R-Squared digunakan sebagai tolak ukur melihat koefisien determinasi apabila variabel pengganggu hanya satu, sedangkan untuk variabel pengganggu yang lebih dari satu yakni Adjusted R-Squared (R-Squared yang telah disesuaikan).Hasil nilai R-Squared dan Adjusted R-Squared dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi**

<b>R-squared</b>	<b>0.899985</b>
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.879149</b>

Sumber: E-views Diolah (2024)

Diketahui nilai AdjustedR-squared Pada Tabel 7 sebesar 0.899985atau 89,99Persen, maka keputusan yang diambil yakni bahwa 89,99 persen variabel UMP, NTP, Primer, Sekunder dan Tersier dapat menjelaskan variabel kemiskinan. Sedangkan sisanya sebesar10,01persen dijelaskan oleh variabel lain diluar pengamatan penelitian.

## 2. Uji F

Pengujian selanjutnya, diperuntukkan untuk menganalisis kesesuaian model, statistik f-test dirancang dengan tujuan untuk sebagai acuan menarik keputusan apakah variabel eksternal include dalam model dan dapat menggambarkan hubungan linear dengan variabel internal. Hasil Penelitian uji signifikansi f sebagai berikut.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

<b>F-statistic</b>	<b>43.19283</b>
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>

Keterangan: \*\*\*) signifikan di 1%, \*\*) signifikan di 5% dan \*) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan

Sumber: E-Views (Diolah), 2024

Dalam tabel 8 dapat diketahui bahwa Nilai koefisien F-Statistik sebesar 43.19283 dan  $\rho$ -FStatistik (0.000000) kurang dari taraf signifikan. Oleh karena itu, diputuskan bahwa variabel bebas secara serempak mempengaruhi variabel terikat.

## 3. Uji T

Pengujian yang terakhir dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel dependent serta seberapa besar pengaruh yang dinyatakan oleh variabel tersebut. Berikut hasil penelitian uji t.

**Tabel 9. Hasil Uji T**

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	22.33707	2.991649	7.466474	0.0000
<b>UMP</b>	-0.092451	0.023949	-3.860288	0.0007***
<b>NTP</b>	-2.263381	2.753494	-8.220032	0.0000***
<b>I_PRIMER</b>	-0.009468	0.002640	-3.586528	0.0015***
<b>I_SEKUNDER</b>	0.212533	0.027362	7.767571	0.0000***
<b>I_TERSIER</b>	-0.208281	0.023833	-8.739209	0.0000***

Keterangan: \*\*\*) signifikan di 1%, \*\*) signifikan di 5% dan \*) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan

Sumber: E-Views (Diolah), 2024

Berikut Tabel 9 dapat menjelaskan bahwa:

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien UMP sebesar -0.092451 dan nilai  $\rho$  (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0007. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh masih lebih kecil dari taraf signifikan (1%) sehingga  $H_0$  diterima. Hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien NTP sebesar -2.263381 dan nilai  $\rho$  (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0000. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikan sehingga  $H_0$  diterima. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien IP sebesar -0.009468 dan nilai  $\rho$  (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0015. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka

nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikan sehingga  $H_0$  diterima. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien IS sebesar 0.212533 dan nilai  $\rho$  (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0000. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikan sehingga  $H_0$  diterima. Hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien IS sebesar -0.208281 dan nilai  $\rho$  (Prob) untuk variabel adalah sebesar 0.0000. Jika nilai p-value dibandingkan dengan taraf signifikansi maka nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikan sehingga  $H_0$  diterima.

### **Pengaruh UMP Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Koefisien sebesar -0.092451 dengan nilai  $\rho$ -value sebesar  $0.0007 < \alpha$ . Artinya, bahwa setiap peningkatan UMP sebesar 1 rupiah dapat mengurangi kemiskinan dan bisa menjelaskan secara nyata terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2017-2022

Hal di atas dapat terjadi karena kenaikan UMP akan memberikan peningkatan upah kepada masyarakat yang bekerja sesuai standar tersebut. Peningkatan upah pekerja ini kemudian dapat mengalami peningkatan hidup masyarakat di karenakan ketika pekerja belum memperoleh kenaikan upah, penghasilan masyarakat pekerja hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika mengalami kenaikan upah, hidup masyarakat pekerja akan meningkat dari yang sebelumnya upah mereka hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan keperluan rumah tangga lainnya. Saat mengalami kenaikan upah bisa di pergunakan untuk keperluan lain atau bisa di simpan untuk di gunakan di suatu saat nanti. Peningkatan pendapatan ini pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan, karena sebagian besar masyarakat pekerja memperoleh penghasilan yang lebih baik. Provinsi DKI Jakarta menonjol sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Salah satu faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta adalah penerapan upah minimum yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tersebut.

Menurut teori Boediono (2014), peningkatan upah minimum dianggap sebagai mekanisme efektif untuk meningkatkan pendapatan penduduk, khususnya dalam konteks kesejahteraan pekerja. Dalam pandangan ini, upah minimum dianggap sebagai instrumen yang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan pekerja, sehingga berpotensi meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan memberikan upah yang lebih tinggi, pekerja dapat memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan kehidupan yang lebih layak

Namun perlu di perhatikan, kenaikan UMP akan mengurangi jumlah kemiskinan ketika di tinjau dari beberapa faktor oleh sebab itu harus di pertimbangkan dengan sebaik baiknya karena kenaikan UMP bisa bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Seperti jika kenaikan UMP menguntungkan pekerja yang berada di bawah garis kemiskinan, maka hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan mereka. Namun, jika kenaikan UMP lebih menguntungkan pekerja yang sudah berpenghasilan di atas garis kemiskinan, dampaknya terhadap kemiskinan dapat menjadi terbatas. Bukan hanya itu efek samping kenaikan UMP terhadap biaya hidup dan inflasi juga perlu diperhatikan. Jika kenaikan UMP menyebabkan daya beli masyarakat menjadi meningkat sehingga mengalami kenaikan biaya hidup secara umum, hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi efektivitas kenaikan UMP dalam mengurangi kemiskinan. Kenaikan UMP juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja. Di satu sisi, jika biaya tenaga kerja naik, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk menggantikan pekerja dengan teknologi atau mesin, atau meminimalkan jumlah pekerja untuk mengurangi biaya. Tidak hanya itu jika kenaikan UMP membatasi kemampuan perusahaan untuk beroperasi dan berkembang, terutama di sektor-sektor dengan margin keuntungan yang tipis, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran.

### **Pengaruh NTP Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah NTP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Koefisien sebesar -2.263381 dengan nilai  $p$ -value sebesar  $0.0000 < \alpha$ . Artinya, bahwa setiap peningkatan NTP sebesar 1 persen dapat mengurangi kemiskinan dan bisa menjelaskan secara nyata terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2017-2022.

Hal diatas dapat terjadi karena peningkatan nilai tukar petani mengindikasikan bahwa harga hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani meningkat relatif terhadap biaya produksi mereka. Sebagai akibatnya, para petani akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari aktivitas pertanian mereka. Peningkatan pendapatan ini kemudian dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Para petani akan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, serta mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, peningkatan nilai tukar petani juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menggerakkan sektor pertanian yang lebih produktif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Mahmud et al., 2020), Dimana Masih ada beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi contohnya seperti provinsi Gorontalo. Pendapatan perkapita yang rendah, Selain itu produktifitas sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan juga nampaknya belummampu memberikan kontribusi yang baik untuk dapat menekan angka kemiskinan. Mengingat sebagian besar masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan yang umumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan seharusnya dapat memanfaatkan sektor pertanian untuk dapat keluar dari zona kemiskinan. Akan tetapi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan juga hasil pertanian yang masih sangat kurang merupakan hal yang perlu diperhatikan agar kontribusi sektor pertanian bisa maksimal untuk menekan angka kemiskinan.

Namun, penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Suarti (2023) dimana pengaruh NTP terhadap kemiskinan tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NTP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022. Perkembangan NTP di Provinsi Lampung belum mencapai angka optimal, karena angka NTP masih berada dalam kisaran 100. Hal ini mengindikasikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para petani masih sangat rendah. Meskipun terjadi kenaikan NTP, namun peningkatan tersebut masih berada pada tingkat yang rendah sehingga tidak berdampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan

### **Pengaruh Inflasi Sektor Primer Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah IP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Koefisien sebesar  $-0.009468$  dengan nilai  $p$ -value sebesar  $0.0015 < \alpha$ . Artinya, bahwa setiap peningkatan inflasi sektor primer sebesar 1 persen dapat meningkatkan kemiskinan dan bisa menjelaskan secara nyata terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2017-2022

Hal di atas terjadi karena ketika inflasi di sektor primer, yang mencakup pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian, mengalami peningkatan, hal ini dapat berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Pertama, sektor primer seringkali menjadi tulang punggung perekonomian bagi negara-negara yang bergantung pada kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Jika inflasi terjadi di sektor ini, biaya produksi dalam pertanian, perikanan, atau pertambangan juga ikut meningkat. Para pelaku usaha dalam sektor ini mungkin terpaksa menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya yang semakin tinggi. Kedua, peningkatan harga produk pertanian dan perikanan dapat menyebabkan naiknya biaya hidup bagi masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari dapat memberikan tekanan ekonomi kepada rumah tangga



yang mungkin sudah berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Jika pendapatan mereka tidak dapat menyesuaikan dengan kenaikan harga ini, maka tingkat kemiskinan dapat meningkat karena kesulitan memenuhi kebutuhan dasar

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ginantie (2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ridha, Budi dan Purnomo (2018) yang mengemukakan bahwa inflasi tidak berpengaruh nyata terhadap harga penjualan gabah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) juga menunjukkan bahwa sektor pertambangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara Enim

### **Pengaruh Inflasi Sektor Sekunder Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah IS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Koefisien sebesar 0.212533 dengan nilai  $p$ -value sebesar  $0.0000 < \alpha$ . Artinya, bahwa setiap peningkatan inflasi sektor sekunder sebesar 1 persen dapat meningkatkan kemiskinan dan bisa menjelaskan secara nyata terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2017-2022.

Hal di atas dikarenakan ketika inflasi terjadi di sektor sekunder, yang melibatkan industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta sektor konstruksi dapat menyebabkan harga barang-barang konsumen naik. Jika pendapatan individu tidak naik seiring dengan kenaikan harga, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi lebih sulit. Hal ini dapat mengakibatkan lebih banyak orang terjebak dalam kemiskinan.

Hal di atas dikarenakan ketika inflasi terjadi di sektor sekunder, yang melibatkan industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta sektor konstruksi dapat menyebabkan harga barang-barang konsumen naik. Jika pendapatan individu tidak naik seiring dengan kenaikan harga, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi lebih sulit. Hal ini dapat mengakibatkan lebih banyak orang terjebak dalam kemiskinan.

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Agwicahya (2021) dimana variabel inflasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di pulau Jawa dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,10. Penelitian oleh Daton (2019) Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros. Tanda positif tersebut mengindikasikan adanya hubungan searah antara tingkat inflasi dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Artinya, jika

tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros cenderung meningkat, dan sebaliknya, jika tingkat inflasi mengalami penurunan, tingkat kemiskinan juga memiliki kecenderungan untuk turun

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa inflasi di sektor sekunder sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan sektor sekunder merupakan sektor-sektor besar atau didominasi oleh industri yang mana jika terjadi inflasi akan mempengaruhi harga saham yang membuat banyak buruh-buruh mengalami PKH.

### **Pengaruh Inflasi Sektor Tersier Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah IT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Koefisien sebesar  $-0.208281$  dengan nilai  $p$ -value sebesar  $0.0000 < \alpha$ . Artinya, bahwa setiap peningkatan inflasi sektor tersier sebesar 1 persen dapat meningkatkan kemiskinan dan bisa menjelaskan secara nyata terhadap kemiskinan di pulau Jawa tahun 2017-2022.

Hal diatas dikarenakan ketika harga-harga di sektor tersier yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan meningkat di Pulau Jawa akibat inflasi, hal ini dapat berdampak negatif pada tingkat kemiskinan. Pertama, kenaikan biaya hidup di sektor jasa dapat membuat lebih sulit bagi masyarakat yang tergantung pada layanan-layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan risiko kemiskinan. Selanjutnya, inflasi di sektor perdagangan dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Masyarakat yang bergantung pada pembelian barang dan layanan dapat merasakan beban finansial tambahan akibat kenaikan harga, yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, dapat meningkatkan risiko kemiskinan.

Penelitian ini Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yudha (2013) menunjukkan bahwa inflasi memberikan dampak yang positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode tahun 2009 hingga 2011. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti (2015), yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Penelitian ini juga berbeda dengan yang dilakukan oleh Kasim, Engka dan Siwu (2021) dimana variabel Tingkat Inflasi terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sebagaimana tercermin dalam koefisien regresi jumlah kemiskinan sebesar  $-0,09$ . Artinya, apabila Tingkat Inflasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar  $0,09\%$ . Hasil ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara Tingkat Inflasi dan tingkat kemiskinan, menandakan bahwa

peningkatan tingkat inflasi dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang negative dan positif serta signifikan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara UMP terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan UMP sebesar 1 rupiah akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.092451 persen. 2) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara NTP terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan NTP sebesar 1 rupiah akan menurunkan kemiskinan sebesar -2.263381 persen. 3) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara Inflasi Sektor Primer terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Inflasi Sektor Primer sebesar 1 rupiah akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.009468 persen. 4) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Inflasi Sektor Sekunder terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan Inflasi Sektor Sekunder sebesar 1 rupiah akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.212533 persen. 5) Dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh negative dan signifikan secara parsial antara inflasi sektor tersier terhadap Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan inflasi sektor tersier sebesar 1 rupiah akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.208281 persen.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

### 1. Kebijakan Upah Minimum:

Pemerintah dan pengambil kebijakan perlu terus memantau dan menyesuaikan upah minimum secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan hidup layak, sehingga dapat terus mengurangi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa

### 2. Peningkatan Nilai Tukar Petani:

Program-program yang meningkatkan kesejahteraan petani, seperti subsidi pertanian dan akses ke pasar yang lebih baik, perlu diperkuat. Peningkatan NTP terbukti efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perhatian lebih harus diberikan pada sektor pertanian.

3. Pengendalian Inflasi Sektor Primer:

Pemerintah perlu menjaga agar inflasi di sektor primer tetap terkendali. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang menjaga stabilitas harga pangan dan barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari sektor primer

4. Pengendalian Inflasi Sektor Sekunder:

Mengingat inflasi di sektor sekunder berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, perlu adanya kebijakan untuk menekan laju inflasi di sektor ini. Ini bisa mencakup pengendalian harga bahan baku dan energi yang mempengaruhi biaya produksi di sektor sekunder.

5. Pengendalian Inflasi Sektor Tersier:

Pemerintah perlu terus memantau dan mengendalikan inflasi di sektor tersier untuk memastikan bahwa kenaikan harga di sektor ini tidak mengurangi daya beli masyarakat. Langkah-langkah seperti pengaturan tarif jasa dan kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas harga di sektor tersier

Studi Lanjutan:

Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustin, W. (2022). Analisis pengaruh PDRB, IPM, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Studi kasus di 10 provinsi tahun 2015-2019). *UIN* (Issue 8.5.2017).
- Alaniz, E., Gindling, T. H., & Terrell, K. (2011). The impact of minimum wages on wages, work and poverty in Nicaragua. *Labour Economics*, 18(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.06.010>
- Amadea, C. G., & Ali, H. (2023). The effect of inflation, unemployment, and poverty on economic growth in Indonesia (Literature Review). *Contemporary Research: An Interdisciplinary Academic Journal*, 6(1), 72–93. <https://doi.org/10.3126/craiaj.v6i1.55377>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Inflasi Umum Menurut Provinsi Tahun 2017-2022*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi Tahun 2017-2022*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Tingkat Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2017-2022*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Upah Minimum Provinsi Menurut Provinsi Tahun 2017-2022*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

- Dakhilullah, M. F. (2022). Pengaruh upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan di Pulau Jawa sebelum dan selama pandemi Covid-19. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 60–75. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i1.239>
- Febriana, I., & Kencono, A. (2019). Inflasi harga konsumen dan inflasi harga produsen di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, September, 103–108.
- Iswanto, A. (2018). Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016). 1–26.
- Itang. (2014). Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1–30.
- Kadji, Y. (2004). Kemiskinan dan konsep teoritisnya. *CWL Publishing Enterprises, Inc.*, Madison, 9.
- Khabhibi, A. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 80–92.
- Mahmud, F., Olilingo, F. Z., & Akib, F. H. Y. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 130–147. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11872>
- Pratiwi, D. N. (2021). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), nilai tukar petani (NTP) dan indeks upah buruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2010-2019. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Setiyowati, I. L., Sasongko, S., & Noor, I. (2018). Farmer exchange rate and agricultural land conversion analysis to agricultural sector poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(1), 35–43. <https://doi.org/10.17977/um002v10i12018p035>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Yesii, D., & Sugiarto, Y. (2021). The effect of farmer exchange rate, inflation and level of open. 5(1), 116–124.